

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat berlakunya Pajak dan Retribusi Daerah, Pemerintah daerah sebagai pihak yang memungut Pajak dan Retribusi Daerah dan juga menetapkan tarif dengan sebesar-besarnya tarif yang berdasarkan Undang-Undang maka dengan itu masyarakat harus membayar Pajak dan Retribusi Daerah yang terutang setelah itu masyarakat dapat menikmati secara langsung dan serta ada beberapa pajak daerah yang dinikmati secara tidak langsung fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah daerah.

Dengan seiring berjalannya waktu terdapat bermacam-macam jenis Pajak dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Dari bermacam-macam jenis Pajak dan Retribusi Daerah pasti mempunyai berbagai macam ketentuan pengenaan tersendiri dalam masing-masing jenis Pajak dan Retribusi Daerah tersebut.

Pajak daerah yaitu pajak yang diatur dalam peraturan daerah (PERDA) dan ditetapkan oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam mensukseskan penyelenggaraan pemerintahan dan yang paling penting digunakan untuk membiayai pembangunan daerah agar masyarakat dapat hidup makmur dan sejahtera.

Pajak daerah di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah sebagaimana di bawah ini.

A. Jenis Pajak provinsi terdiri atas:

1. Pajak Kendaraan Bermotor;
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
4. Pajak Air Permukaan; dan
5. Pajak Rokok.

B. Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Air Tanah;
9. Pajak Sarang Burung Walet;
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
11. Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Dalam bermacam-macam jenis pajak diatas yang berperan penting dalam menambah Pendapatan Asli daerah salah satunya adalah Pajak Penerangan Jalan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 28, Pajak Penerangan Jalan (PPJ) adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Pajak Penerangan jalan dikenakan tarif paling tinggi 10% dari nilai jual tenaga listrik. Marihot (2005:61) mengemukakan bahwa Salah satu unsur penghitungan pajak yang akan menentukan besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak adalah tarif pajak sehingga penentuan besarnya tarif pajak yang diberlakukan pada setiap jenis pajak daerah memegang peranan penting.

Menurut Azhari (2005:41) Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pengertian dalam arti sempit. Jadi jelas berbeda dengan pengertian sumber pendapatan daerah (secara global). Sebab dari semua sumber-sumber pendapatan hanya sebagian saja yang merupakan Pendapatan Asli Daerah. Contoh dari penerimaan asli daerah adalah penerimaan dari pungutan pajak daerah, dari retribusi daerah, hasil dari perusahaan daerah, dan lainnya yang merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah itu yang digali atau dihasilkan oleh daerah yang bersangkutan dan merupakan pula pendapatan daerah yang syah.

Saat ini tidak semua elemen masyarakat mengetahui atau paham tentang Pajak Penerangan Jalan. Masyarakat banyak yang berasumsi bahwa Pajak Penerangan Jalan adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan penerangan jalan saja. Tetapi pada kenyataannya saat masyarakat membayar tagihan listrik sudah dipotong untuk pembayaran pajak penerangan jalan. Oleh karena itu masyarakat

kurang begitu memperhatikan tentang bagaimana penghitungannya. Serta masyarakat yang menggunakan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri juga kurang begitu memperhatikan dengan pergantian tarif saat ini yang ditetapkan dalam undang-undang pemerintah daerah kota Surabaya dan akan berdampak pada penerimaan Pajak Penerangan Jalan yang akan menambah Pendapatan Asli Daerah kota Surabaya. Dengan itu Pemerintah Daerah harus lebih gencar lagi dalam kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang Pajak Penerangan Jalan.

Berdasarkan uraian diatas, Penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut untuk membuat sebuah tulisan dari hasil penelitian dalam bentuk Tugas Akhir dengan judul **“TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SURABAYA”**.

1.2 Tujuan Studi Lapang

Untuk mengetahui Tata Cara Penghitungan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Surabaya.

1.3 Manfaat Studi Lapang

Selain terdapat tujuan studi lapang, didalam penelitian ini juga terdapat manfaat yang bisa diberikan untuk beberapa pihak yang terkait. Pertama, bagi Penulis yaitu dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai Tata cara penghitungan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Surabaya. Kedua, bagi Pemerintah (Pusat dan Daerah) sebagai alat bantu pemerintah dalam mengevaluasi pengawasan pemungutan pajak penerangan jalan

dan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan. Ketiga, bagi Pembaca yaitu dapat dijadikan bahan referensi pembelajaran untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan tata cara penghitungan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Surabaya.

1.4 Ruang Lingkup Studi Lapang

Ruang lingkup studi lapangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya dengan objek yang diteliti adalah Tata Cara Penghitungan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan untuk melakukan penelitian dalam mengumpulkan data, berikut adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara, yaitu suatu kegiatan untuk mencari data dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung dengan berbagai pihak yang dianggap dapat memberikan data atau keterangan terpercaya. Adapun pihak-pihak yang dimaksudkan, yakni pimpinan maupun pegawai yang berada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) kota Surabaya yang bertugas dalam pengelolaan dan penanganan pajak dan retribusi daerah khususnya Pajak Penerangan Jalan guna memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai masalah yang akan dibahas didalam penelitian.

b. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengambil dokumen atau arsip yang berkaitan dengan Pajak Penerangan Jalan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) kota Surabaya untuk dijadikan acuan dalam penulisan tugas akhir.

